BAB V

KESIMPULAN

Konstitusi yang berlaku dari era sebelum dan setelah Revolusi 2011 untuk dapat menjamin kesetaraan gender dan penolakan diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki tampaknya hanya hitam diatas putih. Konstitusi belum mampu menegaskan dan menyelesaikan masalah-masalah diskriminasi perempuan. Deklarasi dan standar Internasional mengenai hak-hak perempuan dan diskriminasi peremupuan yang telah diratifikasi oleh Mesir juga sepertinya belum mampu menegaskan posisi Mesir dalam merespon masalah perempuan tersebut terlebih dilaksanakan secara keseluruhan. Setelah Revolusi Mesir 2011 nyatanya diskriminasi perempuan semakin terjadi. Berbagai macam laporan maupun survey yang diadakan oleh beberapa lembaga seperti *World Economic Forum* mengenai *Global Gender Report* ,Negara Mesir menduduki posisi yang tidak cukup baik dalam beberapa aspek dalam hal kesetaraan gender, perempuan berada di posisi yang masih menempatkannya di level bawah.

Dalam hal partisipasi politik perempuan tidak memenuhi aspirasi nasionalistis dari perjuangan untuk mewujudkan kemerdakaan dan proses demokratisasi. Akar diskriminasi terhadap perempuan yang berlangsung secara sistematis dalam kurun waktu yang lama menjadi faktor penghambat tingkat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik di Mesir.

Kemudian, dalam sektor ekonomi dan pekerjaan, diskriminasi dalam bentuk penerimaan upah atas jenis kerja yang sama masih terjadi. Jumlah penerimaan upah

yang diterima oleh wanita nyatanya lebih kecil dibanding dengan apa yang diterima oleh pria pada pekerjaan yang sama. Tenaga kerja perempuan muda usia (18-29) dalam hal ini perempuan di usia angkatan kerja hanya berada dalam angka 22%, sedangkan tenaga kerja laki-laki dalam usia angkatan kerja berada di jumlah yang lebih besar yaitu 75%.

Dan dari kehidupan sosial, berbagai media dan survey juga melaporkan bahwa Mesir merupakan Negara yang paling tidak aman bagi perempuan di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Thomas Reuteurs Foundation misalnya pada tahun 2013. Mesir menempati urutan terakhir di antara 22 negara di Timur Tengah sebagai Negara terburuk untuk perempuan. Isu-isu diskriminasi perempuan dalam kehidupan sosial juga nyatanya masih eksis dan terjadi berkali-kali dan mengobarkan kaum perempuan, seperti perkosaan , perdagangan manusia , pelecehan seksual, kekerasan perempuan, mutilasi alat genital pada wanita *(female genital mutilation)*, pemaksaan tes keperawanan pada wanita, dan hal-hal serupa lainnya.

Bahkan setelah Revolusi Mesir 2011, kekerasan terhadap perempuan yang terlihat langsung di kerumunan massa menunjukkan bahwa masalah tersebut meningkat ke level belum pernah terjadi sebelumnya. Momen tersebut terjadi ketika perempuan yang kembali ke jalan untuk mengekspresikan harapan mereka untuk kesetaraan gender pada Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2011 yang tidak lama dari aksi demostrasi Revolusi Januari 2011 bertemu dengan kekerasan ekstrim dan pelecehan tidak hanya dari aparat keamanan, tetapi oleh pengunjuk rasa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua lapisan masyarakat tidak terkecuali

aparat keamanan yang harusnya mampu melindungi bahkan ikut serta dalam melanggengkan kekerasan terhadap perempuan di Mesir.

UN Women sebagai entitas atau organisasi Internasional di bawah naungan PBB yang berfokus pada permasalahan kesetaraan gender hadir dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Mesir . UN Women bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah dengan membangun Rezim Kesetaraan Gender melalui *gender mainstreaming* yang dalam hal ini dituangkankan dalam tiga fokus program.

Pertama, dalam merespon kurangnya keterwakilan atau partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan, UN Women telah aktif terlibat dalam dukungan langsung untuk koalisi 500 Lembaga Non-Pemerintah (LSM) perempuan dalam pembentukan *Egyptian Women Charter* / Piagam Wanita Mesir. *Egyptian Women Charter* merupakan sebuah alat lobi yang kuat dalam mengartikulasikan harapan perempuan akan transisi demokrasi. Di tahun yang sama pula UN Women juga terlibat dalam sebuah pembentukan bersejarah yaitu pembentukan *Egyptian Women's Union* atau Serikat Perempuan Mesir dengan tujuan memobilisasi lima juta pemilih perempuan dalam pemilihan parlemen dan presiden yang akan datang, dan referendum konstitusional. Ini juga akan mendukung perubahan agenda partai untuk memasukkan perempuan dalam partai tersebut. Dalam mengadvokasi hak-hak perempuan dalam konstitusi baru Mesir pada tahun 2012, UN Women bersama *Egyptian Center for Women's Right* mengadakan acara *roundtable* yang diikuti juga oleh 97 peserta dari berbagai macam organisasi. Hal tersebut dilakukan untuk mengadvokasi amandemen konstitusi dan legislatif yang dapat mencerminkan

agenda hak-hak perempuan, dan mewujudkan sikap demokrasi dimana perempuan diberdayakan untuk bertindak sebagai warga negara yang sama, dan secara benar terlibat dalam semua tingkat pengambilan keputusan baik di bidang swasta dan publik

UN Women juga aktif dalam mengkampanyekan pemilu sadar gender dimana kandidat politisi perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sebagai calon dan politisi yang efektif, dan memastikan bahwa manajemen pemilu merespon kepentingan perempuan, juga melindungi perempuan dari kekerasan pemilu. Bermitra dengan institusi seperti Universitas Kairo, misalnya, UN Women telah membantu merekrut pengamat pemilihan perempuan dan mengadakan sesi pelatihan untuk kandidat perempuan dan manajer kampanye mereka.

Dalam sebuah inisiatif "*Women Citizenship Initiative*", UN Women bersama *the United Nations Development Programme, the Egyptian Ministry of State for Administrative Development* (MSAD), the *Civil Status Registry of the Ministry of the Interior*, the *Social Fund for Development* dan sejumlah aktor masyarakat sipil serta badan nasional menciptakan program untuk mendaftarkan dan menerbitkan 2 juta kartu identitas (KTP) untuk wanita pedesaan dan terpinggirkan di seluruh Mesir dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuannya adalah agar perempuan di pedesaan mendapatkan akses dalam segala aspek kehidupan tidak terkecuali pada proses politik sehingga terdaftar sebagai pemilih. Dukungan UN Women dalam peningkatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan di Mesir membawa rekor

jumlah perempuan ke tempat pemungutan suara di Mesir dengan peningkatan pemilih perempuan dari 40 % menjadi 46%.

Kedua, UN Women berupaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Mesir dengan menciptakan suat program besar bernama *"Safe Cities Programme"*dengan dukungan dari *United States Agency for International Development* (USAID), Uni Eropa, dan Kerjasama Spanyol / *Spanish Cooperation* (AECID) serta melibatkan kemitraan yang kuat dengan pemerintah Mesir, akar rumput wanita, Lembaga Non-Pemerintah / NGO, UN Habitat, badan-badan PBB lainnya, sektor swasta dan mitra lainnya. Fokusnya adalah melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan dalam konteks Model Kota Aman yang akan diujicobakan di Wilayah Greater Kairo dan juga di daerah perkotaan Giza dan Qalyubiya. Dalam inisiatif lain, UN Women mengkordinasikan kampanye UNiTE untuk menghentikan Kekerasan terhadap Perempuan dengan tujuan untuk secara khusus melibatkan kaum Pria muda dalam kampanye tersebut.

Ketiga, dalam merespon ketidaksetaraan gender perempuan dalam partisipasi ekonomi, UN Women Mesir telah menjadi advokat yang kuat untuk menjamin hak dan partisipasi perempuan yang setara dalam sektor ekonomi formal dan informal. Terdapat 2 sub program yang menjadi fokus UN Women dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.

Salheya merupakan program kerjasama UN Women dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Pusat Penelitian Sosial Universitas Amerika di Kairo / *Social Research Center of the American University in Cairo* bertujuan untuk

meningkatkan jumlah pengangguran perempuan muda dari pendidikan menengah dan tinggi dalam bidang ekonomi. Kursus pelatihan untuk menerapkan prinsip pengarusutamaan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja baik di perusahan swasta maupun perusahaan publik tersebut dilakukan untuk menerapkan kesetaraan gender dalam sistem manajemen perusahaan. Kemudian, *Pro-Poor Horticulture Value Chains In Upper Egypt (Salasel)* juga diciptakan dalam Program Bersama yang dijalankan UN Women dengan UNDP, UNIDO, ILO, dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Mesir dan Kementerian Investasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor hortikultura di Mesir dan memperbaiki kondisi kerja petani kecil dan pekerja pertanian, terutama perempuan, di sepanjang berbagai simpul rantai nilai. Program ini mampu membangun 2 perempuan pertama yang memimpin koperasi termasuk 25 wanita di masing-masing provinsi. Koperasi perempuan baru ini adalah bagian dari program Salasel. Dengan mengorganisir kegiatan dalam menghasilkan pendapatan, ini bertujuan untuk memperbaiki posisi petani kecil di pasar ekspor dan domestik dan menciptakan lapangan kerja yang layak dan aman di wilayah ini untuk pria dan wanita.UN Women telah meluncurkan tiga koperasi yang dipimpin perempuan di Mesir Atas (*Upper Egypt)* untuk mendorong masuknya perempuan ke dalam ekonomi dan memajukan kesetaraan gender.

Sebagai entitas PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, UN Women dalam menjalankan program-programnya tetap tidak bisa berjalan sendiri. UN Women mengundnag kerjasama dengan berbagai pihak dalam memaksimalkan upayanya. Dengan adanya upaya-upaya tersebut diatas berarti

bahwa UN Women sangat serius dalam menangani permasalahan diskriminasi terhadap perempuan di Mesir. Walaupun belum dapat menghapuskan diskriminasi terhadap semua kaum perempuan di Mesir secara menyeluruh dalam aspek-aspek kehidupan, tetapi hadirnya UN Women di Mesir mampu memberikan angin segar bagi perempuan dalam memperbaiki kondisi diskriminasi mereka sehingga sebagai pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah Mesir dapat lebih memperhatikan permasalahan yang terjadi pada semua warga Negara tidak terkecuali perempuan.